

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kearah yang lebih baik yang memiliki tujuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan serta meningkatkan dukungan terhadap UMKM sebagai akses perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan terbentuk usaha yang memiliki skala besar maupun kecil yang beragam.

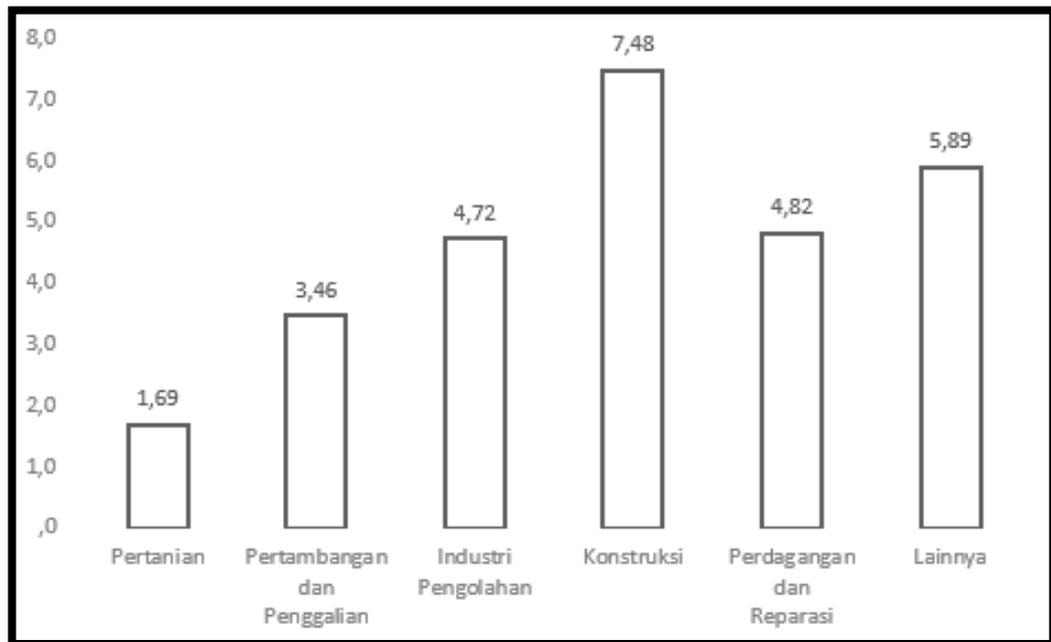
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dijalankan oleh perseorangan, yang berperan signifikan dalam perekonomian. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3, ditegaskan bahwa UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat aktivitas usaha guna membangun sistem perekonomian nasional yang adil dan berbasis demokrasi ekonomi.

Dinas Koperasi dan UMKM menaungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dinas ini memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dalam mendukung kemajuan UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020

yang kemudian disempurnakan melalui PP Nomor 43 Tahun 2020. Fokus utama program ini adalah menanggulangi efek pandemi dan memperkuat perekonomian nasional. Dalam rangka mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah memberikan berbagai bentuk bantuan melalui beberapa skema, antara lain: (1) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), (2) Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM), (3) Subsidi bunga atau margin untuk pembiayaan non-KUR, (4) Penempatan dana negara pada perbankan, (5) Penjaminan kredit untuk UMKM, (6) Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM), (7) Penangguhan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM oleh pemerintah, dan (8) Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) (Sulastri, 2022).

UMKM dinilai penting karena memiliki kemampuan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian yang saat ini menjadi sebagai dasar sumber pendapatan masyarakat (Aji & Listyaningrum, 2021). Peran UMKM dalam mendukung perekonomian nasional sangat signifikan, terbukti dari kemampuannya menyerap hampir 117 juta tenaga kerja, yang merepresentasikan sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia (Junaidi, 2023), hal ini membuktikan bahwa kontribusi UMKM yang sangat besar terhadap tingkat pendapatan rumah tangga, salah satunya dengan menurunkan angka pengangguran. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 61% pada 2023. Dapat dibenarkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia

sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian (Tambunan, 2023).



**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha (Y-ON-Y) (Persen) Triwulan III-2024**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha diatas menunjukkan bahwa sektor yang memiliki perkembangan pesat dapat memberikan peluang bagi UMKM untuk beradaptasi dan memanfaatkan kondisi ekonomi yang menguntungkan. Konteks ini, sektor perdagangan menjadi pendorong utama nomor 3 pertumbuhan yang membuka peluang UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Kondisi ini relevan pada Kecamatan Candi, mengingat sebagian besar UMKM disana bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman (Rochmawati, 2024), hal ini dapat memanfaatkan momentum ini untuk

meningkatkan produksi serta memperluas jaringan distribusi. Melalui dukungan infrastruktur yang memadai dan lokasi yang strategis, UMKM di Kecamatan Candi memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Pemerintah daerah setempat dapat memfasilitasi akses ke platform digital dan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan modal usaha dan memperluas jangkauan pasar (Rochmawati, 2024)

Data yang terdapat pada BPS, total keseluruhan pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2023 adalah 4.500.584, dimana angka paling tinggi terdapat pada Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 913.962 dari total keseluruhan. Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap populasi UMKM yang ada di Indonesia.

**Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
<b>Kabupaten/Regency</b>	
Pacitan	40.441
Ponorogo	23.536
Trenggalek	28.043
Tulungagung	40.588
Blitar	35.498
Kediri	23.613
Malang	39.722
Lumajang	11.223
Jember	37.254
Banyuwangi	34.811
Bondowoso	43.001
Situbondo	35.924
Probolinggo	39.597
Pasuruan	23.730
Sidoarjo	15.730
Mojokerto	20.817
Jombang	32.798

Sumber : Badan Pusat Statistik

**Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
<b>Kabupaten/Regency</b>	
Nganjuk	13.277
Madiun	10.299
Magetan	21.235
Ngawi	13.586
Bojonegoro	35.771
Tuban	14.275
Lamongan	30.772
Gresik	14.146
Bangkalan	19.188
Sampang	18.288
Pamekasan	46.714
Sumenep	42.967
<b>Kota/Municipality</b>	
Kediri	4.007
Blitar	3.714
Malang	13.111
Probolinggo	3.941
Pasuruan	5.591
Mojokerto	2.250
Madiun	3.848
Surabaya	15.650
Batu	3.494
<b>Jawa Timur</b>	<b>862.450</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai Jumlah Perusahaan pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Kabupaten Sidoarjo berada pada nomor 23 dari total keseluruhan 38 kabupaten/kota yang terdapat di Jawa Timur. Hal ini dapat dikatakan bahwa meskipun Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan usaha mikro, posisinya berada ditengah yang dimana hal ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing.

Tingginya jumlah UMKM yang ada di Indonesia tidak terlepas dengan suatu tantangan yang ada. Agar mampu untuk bersaing, sebuah usaha harus merumuskan suatu strategi untuk bersaingnya, hal ini disusun melalui investigasi yang menyeluruh pada beberapa aspek, seperti kondisi pesaing lainnya, ekonomi, sosial budaya, dan yang paling penting aspek teknologi (Palupi et al., 2022). Salah satu peran sebuah teknologi adalah mampu menjadi sumber pendapatan utama dalam perekonomian yang digital (Silaban & Yasin, 2024).

Saat ini memasuki era yang serba digital, perkembangan teknologi sangat cepat, salah satunya *financial technology*. Inovasi dalam layanan keuangan yang didorong oleh kemajuan teknologi dikenal sebagai *financial technology* (Marginingsih, 2021). Hal ini memberikan sebuah peluang yang tepat bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja serta pendapatan mereka. Fintech sendiri terdapat berbagai macam layanan, mulai dari pinjaman *peer-to-peer*, *digital payment*, dan manajemen keuangan yang cukup bagus yang lebih efisien, hal ini dapat diakses secara mudah oleh pelaku UMKM melalui perangkat digital.

Konteks adanya perkembangan *technology financial*, fenomena ini telah membawa perubahan yang pesat dalam hal cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Fintech ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga dapat mengubah perilaku transaksi konsumen, yang kini lebih memilih metode yang cepat dan efisien. Dengan adanya teknologi yang tinggi melalui *smartphone* dan tingginya pengguna internet, fintech ini dijadikan solusi oleh banyaknya pelaku UMKM yang sebelumnya mendapatkan kesulitan pada layanan keuangan dari bank konvensional.

Dilansir pada *website* Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia terlihat dari jumlah perusahaan fintech yang memiliki lending berizin OJK per 24 Juli 2024 sejumlah 98 perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa adanya kebutuhan yang mendesak untuk layanan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Dimana berbagai layanan yang terdapat pada fintech menawarkan alternatif yang lebih mudah diakses oleh masyarakat terpencil dibandingkan dengan layanan perbankan tradisional.

Untuk dapat menggunakan fintech secara maksimal, para pelaku UMKM perlu memiliki tingkat literasi fintech secara maksimal. Literasi fintech mencakup pengetahuan penggunaan teknologi dalam mengelola keuangan, serta pengetahuan mengenai risiko yang akan timbul dari penggunaan layanan fintech tersebut. Literasi fintech menjadi aspek yang penting dalam konteks ini, dengan meningkatnya penggunaan teknologi keuangan, pelaku usaha diharapkan untuk dapat menguasai dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan digital untuk meningkatkan kegiatan operasional secara efisien dan memperluas jangkauan konsumen atau pasar mereka. Memiliki wawasan serta pengetahuan yang lebih mengenai cara mengelola platform fintech dapat membantu UMKM dalam mengakses informasi keuangan, melakukan transaksi, serta mengelola arus kas yang lebih baik.

Keberhasilan suatu UMKM tidak hanya bergantung pada akses keuangan, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar yang sering berubah. Pada konteks ini, literasi fintech dapat membantu pelaku UMKM untuk memahami dan mengeksplorasi alat keuangan digital untuk

meningkatkan visibilitas produk mereka di pasar. Maka dari itu, pelaku UMKM yang memiliki wawasan serta pengetahuan yang baik mengenai teknologi keuangan akan lebih mampu untuk bersaing dengan usaha lain.

Selain keterbatasan pengetahuan mengenai teknologi digital khususnya pada *financial technology*, pelaku UMKM juga memiliki keterbatasan pada modal. Guna untuk mengembangkan usahanya, keterbatasan modal merupakan tantangan yang cukup besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah dan perbankan memiliki peran untuk membuat kebijakan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan UMKM dengan bantuan kredit usaha. Adapun kebijakan pemerintah untuk mengembangkan UMKMyaitu dengan membuat program pemerintah berbentuk pembiayaan UMKM yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu program pemerintah yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM dalam meningkatkan akses modal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebuah program pemerintah yang dirancang untuk memiliki tujuan akses pembiayaan bagi UMKM. Program ini digunakan untuk memberikan dukungan modal kepada pelaku UMKM yang memiliki suatu potensi namun belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk dapat menggunakan akses produk dan layanan perbankan, termasuk pinjaman melalui KUR yang memiliki suku bunga yang tergolong rendah dan persyaratan yang lebih mudah (Huda, 2019), KUR diharapkan dapat memperkuat suatu kapasitas finansial UMKM dan mendorong

perkembangan usaha. Tetapi, efektivitas KUR ini sangat bergantung pada suatu pemahaman dan literasi pelaku UMKM dalam mengelola pinjaman tersebut.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pedoman pelaksanaan KUR. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa penerima KUR merupakan individu, baik secara sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha, yang menjalankan usaha produktif dan memperoleh pembiayaan melalui program KUR. Sementara itu, Pasal 5 menyatakan bahwa pihak penyalur KUR terdiri dari lembaga keuangan maupun koperasi.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas oleh pemerintah turut menjadi alternatif solusi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Candi. Sejak Desember 2020 hingga Juli 2023, sebanyak 1.584 pelaku UMKM di Sidoarjo telah menerima manfaat dari total plafon anggaran sebesar Rp 45,7 miliar (Dinas Komunikasi dan Informasi, 2023). Dapat disimpulkan bahwa program ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam mengatasi masalah keterbatasan modal yang dimana hal ini sering menjadi penghambat dalam pengembangan suatu usaha. Program ini menawarkan solusi finansial yang sangat terjangkau bagi pelaku UMKM di Kecamatan Candi, karena Kecamatan Candi termasuk dalam wilayah yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, khususnya melalui sektor UMKM. Hal ini menjadikan Kecamatan Candi sebagai lokasi yang ideal untuk pengembangan usaha.

Beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa inovasi di bidang financial technology turut mendorong kemajuan sektor UMKM. Berdasarkan penelitian

yang dikemukakan (Laela et al., 2024) menunjukkan bahwa *financial technology* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM, mereka menyimpulkan bahwa pelaku UMKM lebih memilih transaksi jual beli secara konvensional dan menganggap bahwa lebih mudah dalam mengelola pendapatan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan (Nindhya & Widajantie, 2024) menghasilkan bahwa *financial technology* memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan, Ini menggambarkan bahwa semakin besar penggunaan teknologi keuangan dapat memungkinkan UMKM memiliki keuangan yang baik pengelolaannya agar dapat meningkat pendapatan. Perbedaan hasil antara penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antara literasi fintech dan pendapatan UMKM, seperti tingkat pendidikan, aksesibilitas teknologi, dan pemahaman tentang manfaat teknologi finansia.

Sementara, saat ini akses modal sangat mudah dijangkau dikarenakan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Taha et al., 2022) menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM, penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pelaku UMKM tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan, sebab pemanfaatan dana pinjaman tersebut juga mengandung risiko, terutama terkait kemungkinan ketidakmampuan membayar angsuran beserta bunga yang dikenakan. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Karama et al., 2023) menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya pendapatan UMKM, hal ini disebabkan adanya bantuan

modal serta pelaku UMKM memanfaatkan dana yang diperoleh secara efektif. Perbedaan hasil antara kedua penelitian ini menciptakan *research gap* untuk diteliti lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi dampak KUR terhadap pendapatan UMKM, seperti manajemen keuangan, pengalaman dalam berbisnis, dan strategi penggunaan modal.

Adanya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengisi keterbatasan tersebut dengan menganalisis **Pengaruh Literasi *Financial Technology* dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo**. Hasil dari penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam bidang keuangan dan wirausaha, selain itu juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang program dukungan finansial yang lebih efektif. Penelitian ini menjadi langkah awal untuk menggali lebih dalam potensi yang ada serta menyusun strategi-strategi konkret dalam rangka mendukung keberlanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai :

1. Apakah Literasi Fintech berpengaruh terhadap Pendapatan pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap Pendapatan pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji dan menganalisis dampak Literasi Fintech terhadap Pendapatan pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk menguji dan menganalisis dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan pada UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Universitas

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya materi ajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional ““Veteran”” Jawa Timur, khususnya dalam konteks fintech dan pembiayaan UMKM.

2. Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya literasi fintech dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan produk keuangan digital serta dengan memahami KUR dan cara mengaksesnya, pelaku UMKM dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha.

3. Pemerintah

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang mendukung sektor UMKM, termasuk program pelatihan literasi keuangan dan akses terhadap KUR.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat dijadikan studi kasus bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik untuk memahami dinamika UMKM di daerah tertentu, serta bagaimana faktor-faktor eksternal seperti literasi fintech dan KUR mempengaruhi pendapatan usaha, serta hasil penelitian dapat menjadi bahan diskusi dalam seminar atau forum akademis lainnya, yang dapat mendorong pertukaran ide dan pemikiran antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan